



**2020/2021**

# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT**

---

**KABUPATEN SIAK**



**2020/2021**

# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT**

---

**KABUPATEN SIAK**

# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SIAK 2020/2021**

ISSN : -  
No. Publikasi : 14050.2125  
Katalog BPS : 4102004.1405  
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman : xiv+ 64 halaman

Naskah :  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak

Gambar Kulit :  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak

Diterbitkan Oleh :  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak

## **ORGANISASI PENULISAN**

Pengarah:  
Khairunas, SE

Penyunting:  
Khairunas, SE  
Riswanti Ifdalwani Berutu, S.Tr.Stat

Penulis:  
Andromeda Prima Satya Winarso, S.Tr.Stat

Pengolah Data:  
Andromeda Prima Satya Winarso, S.Tr.Stat

Infografis:  
Andromeda Prima Satya Winarso, S.Tr.Stat

Gambar Kulit:  
Andromeda Prima Satya Winarso, S.Tr.Stat



# KATA PENGANTAR

**Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Siak 2020/2021** merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Siak antar waktu. Data yang digunakan adalah data BPS yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Sensus Penduduk 2020 dan 2021.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut enam bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Taraf dan Pola Konsumsi, serta Perumahan dan Lingkungan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Siak Sri Indrapura, Desember 2021  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Siak

KHAIRUNAS, SE



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar .....	xi
Singkatan dan Akronim.....	xiii
1. Kependudukan .....	1
2. Kesehatan .....	15
3. Pendidikan .....	25
4. Ketenagakerjaan .....	37
5. Taraf dan Pola Konsumsi .....	45
6. Perumahan dan Lingkungan .....	51
Daftar Pustaka .....	61
Istilah Teknis .....	63



## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2010 dan 2020	4
Tabel 1.2	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak, 2020	7
Tabel 1.3	Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, di Kabupaten Siak, 2016-2020	8
Tabel 1.4	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Siak, 2019-2020	13
Tabel 1.5	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kabupaten Siak, 2019-2020	14
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2019-2020	19
Tabel 2.2	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kabupaten Siak, 2018-2020	21
Tabel 2.3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Siak, 2018-2020	22
Tabel 2.4	Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2020	23
Tabel 2.5	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2020	24

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 3.1	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Siak, 2019-2020	29
Tabel 3.2	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Siak, 2019-2020	32
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Siak, 2019-2020	35
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Siak, 2019-2020	36
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Siak, 2019-2021	41
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Siak, 2019-2021	42
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Siak, 2019-2021	43
Tabel 5.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Siak, 2020-2021	48
Tabel 5.2	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita/bulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Siak, 2020-2021	49
Tabel 6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Siak, 2019-2020	55
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Siak, 2019-2020	57
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Siak, 2019-2020	59

## DAFTAR GAMBAR

		<b>Halaman</b>
Gambar 1.1	Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2010 dan 2020	6
Gambar 1.2	Persentase Wanita 10 + tahun pernah kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Siak, 2019-2020	11
Gambar 2.1	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Siak, 2011-2020	18
Gambar 3.1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Siak, 2019-2020	31
Gambar 3.2	Persentase Penduduk 7 -24 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Siak,2020	33



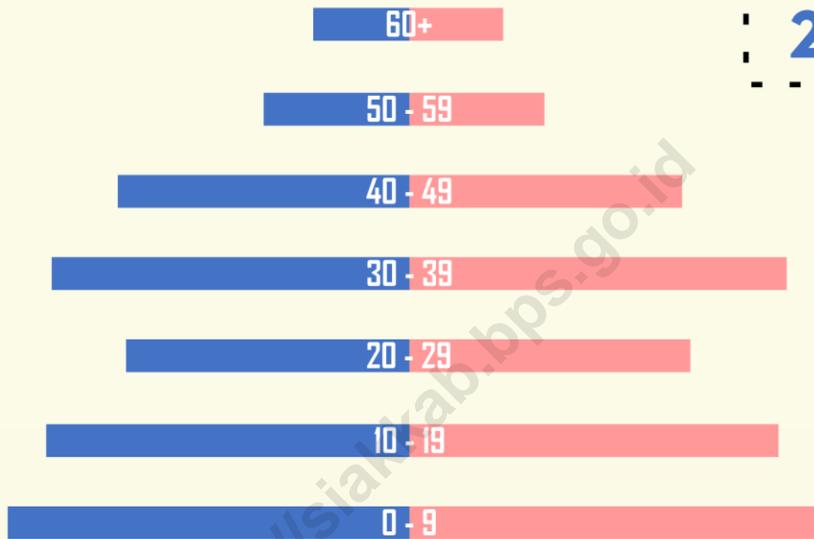
## SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
Raskin	Beras Miskin
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SM	Sekolah Menengah
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka



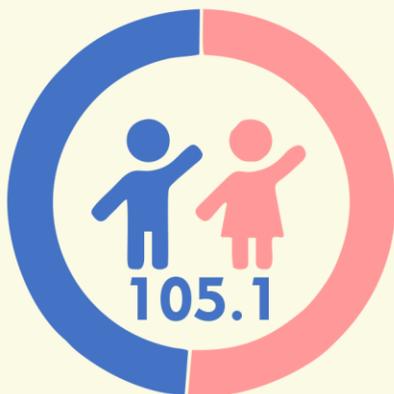
1

# KEPENDUDUKAN



2020

## PIRAMIDA PENDUDUK



RASIO JENIS KELAMIN



457 940

JUMLAH PENDUDUK



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SIAK





# 1. KEPENDUDUKAN

**I**su kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain masalah pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

### Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Provinsi Riau dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk yang besar, termasuk di Kabupaten Siak. Saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Siak pada tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk tercatat sebanyak 457.940 jiwa yang terdiri dari 236.494 jiwa penduduk laki-laki dan 221.446 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 81,2 ribu jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 yang mencapai 376.742 jiwa, atau meningkat sebesar 21,55 persen selama 10 tahun terakhir. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,91 persen.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2010 dan 2020**

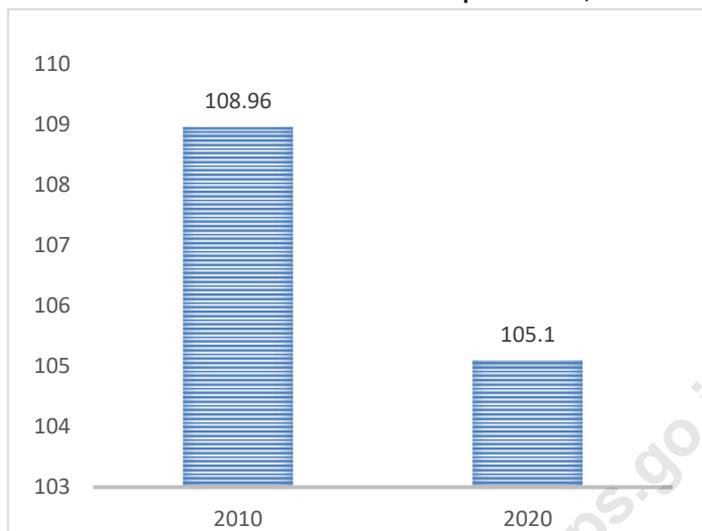
Tahun	Jumlah Penduduk Laki-laki (Jiwa)	Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	196.448	180.294	376.742	108.96
2020	236.494	221.446	457.940	105.10

Sumber : Sensus Penduduk Kabupaten Siak 2010-2020

Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Siak telah menunjukkan arah menuju adanya keberhasilan.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, di Kabupaten Siak, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2020 sebesar 105,10. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 105 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Siak lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Namun rasio ini sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 dengan rasio jenis kelamin sebesar 108,96. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Siak sudah semakin merata setelah 10 tahun berlalu.

**Gambar 1.1. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2010 dan 2020**



Sumber : Sensus Penduduk Kabupaten Siak 2010-2020

### **Persebaran dan Kepadatan Penduduk**

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi nasional dan juga di Kabupaten Siak adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar seperti Kecamatan Tualang dan Kandis, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit seperti Kecamatan Sungai Mandau dan Pusako. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Di sisi lainnya, wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

**Tabel 1.2 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak, 2020**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah	% Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Minas	Minas Jaya	346,35	4,05	84
Sungai Mandau	Muara Kelantan	1705	19,93	5
Kandis	Telaga Sam-sam	1493,65	17,46	50
Siak	Kampung Dalam	894,17	10,45	35
Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	128,66	1,50	185
Tualang	Perawang	343,6	4,02	351
Dayun	Dayun	232,24	2,71	133
Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	155,09	1,81	128
Koto Gasib	Pangkalan Pisang	704,7	8,24	33
Mempura	Sungai Mempura	437,45	5,11	39
Sungai Apit	Sungai Apit	1346,33	15,74	23
Bunga Raya	Bunga Raya	151	1,76	177
Sabak Auh	Bandar Sungai	73,38	0,86	176
Pusako	Dusun Pusaka	544,47	6,36	14
<b>KAB. SIAK</b>	<b>Siak Sri Indrapura</b>	<b>8556,09</b>	<b>100,00</b>	<b>54</b>

Sumber : Kabupaten Siak Dalam Angka, 2020

Pada tahun 2020 kepadatan penduduk di 14 kecamatan sangat heterogen. Ada beberapa kecamatan yang penduduknya sangat padat dan ada juga kecamatan yang penduduknya sangat sepi. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Siak tahun 2020 adalah 54 jiwa per km<sup>2</sup>.

Jumlah kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Tualang dengan 351 penduduk per 1 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kerinci Kanan dengan 185 penduduk per 1 km<sup>2</sup>. Sementara itu, kecamatan yang kepadatan penduduknya rendah adalah Kecamatan Sungai Mandau dengan 5 penduduk per 1 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Pusako dengan 14 penduduk per 1 km<sup>2</sup>.

### Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (kelompok umur 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (kelompok umur 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (kelompok umur 65 tahun keatas). Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

**Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, di Kabupaten Siak, 2016-2020**

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65 + tahun	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	33,28	64,71	2,01	54,53
2017	32,99	64,91	2,09	54,05
2018	32,71	65,10	2,19	53,61
2019	32,43	65,28	2,30	53,19
2020	28,88	68,39	2,72	46,21

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahunan 2010-2020 Provinsi Riau

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2016-2020 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 angka beban tanggungan di Kabupaten Siak sebesar 53,19 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 53 penduduk usia belum/tidak produktif. Pada tahun 2020 angka beban tanggungan penduduk turun menjadi 46,21 persen artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 46 penduduk belum/tidak produktif.

Rasio ketergantungan yang cenderung terus mengalami penurunan belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak memperoleh pekerjaan. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2019 ada sebanyak 32,43 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 28,88 persen pada tahun 2020. Struktur umur penduduk Kabupaten Siak masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2020 mencapai 65,28 persen pada tahun 2019 dan kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 68,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Siak menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 2,30 persen pada tahun 2019 menjadi 2,72 persen pada tahun 2020.

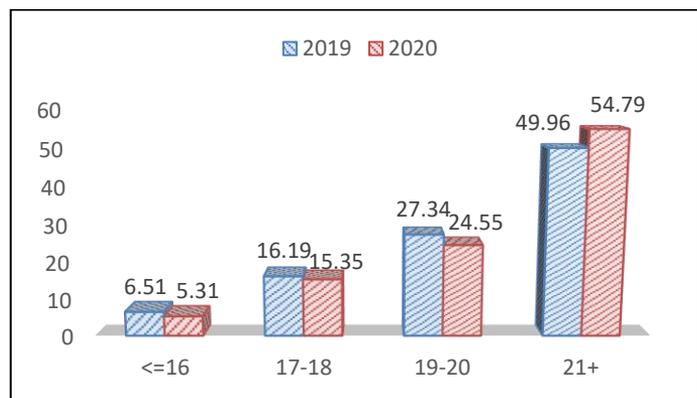
### **Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama**

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

*Angka fertilitas yang tidak dapat terkendali akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat.*

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya, semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya. Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama, diantaranya sebagai berikut: Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

**Gambar 1.2 Persentase Wanita 10+ tahun pernah kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Siak, 2019-2020**



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

Pada tahun 2020 persentase wanita umur 10 tahun ke atas di Kabupaten Siak yang melakukan perkawinan pertamanya di usia 10-16 tahun sebesar 5,31 persen menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 6,51 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama sudah cukup baik. Pada usia 10-16 tahun, seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga. Terlebih lagi, usia 10-16 tahun seharusnya adalah usia ketika mereka sedang duduk di bangku SD/Sederajat atau SMP/Sederajat. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pada persentase perempuan berumur 10 tahun keatas yang pernah kawin yaitu pada kelompok umur 17-21 tahun keatas. Gambaran ini menjelaskan bahwa pergeseran usia kawin pertama sejalan dengan kondisi ideal, yaitu pada umur 20 tahun keatas.

### **Penggunaan Alat/Cara KB**

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi. Lambatnya kenaikan angka cakupan ber-KB dipicu oleh beberapa faktor. Utamanya adalah masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB (*unmet need*) dengan berbagai alasan dan kendala.

Selain itu adalah makin kecilnya akseptor KB yang ikut program KB dengan metode jangka panjang, sehingga angka *drop out* KB menjadi tinggi. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2019-2020, persentase Wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang pernah/sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai di atas 60 persen yaitu masing masing sebesar 72,04 persen pada tahun 2019 dan 63,29 persen pada tahun 2020.

Tabel 1.4 menunjukkan adanya penurunan penggunaan alat/cara KB. Menurut BKKBN, Penurunan penggunaan alat kontrasepsi disebabkan oleh ketakutan masyarakat akan adanya kemungkinan transmisi COVID-19 di pusat-pusat pelayanan kesehatan serta kebijakan pembatasan sosial. Hal ini berakibat pada berkurangnya mobilitas masyarakat untuk mengunjungi pelayanan kesehatan reproduksi dan mengakses alat kontrasepsi.

**Tabel 1.4 .Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Siak, 2019-2020**

Status Penggunaan Alat/Cara KB	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Ya, Pernah	15,55	16,29
Ya, Sedang	56,49	47,00
Tidak Pernah Menggunakan	27,96	36,71
<b>Jumlah</b>	100	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek

maupun jangka panjang. Akseptor KB dapat memilih untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu yang akan digunakan. Penggunaan alat KB dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakaian dan memberikan kenyamanan bagi penggunaannya.

Tabel 1.5 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil KB yang paling banyak diminati. Pada tahun 2019 penggunaan suntikan mencapai 50,14 persen dan turun menjadi 41,24 persen pada tahun 2020. Sementara itu, penggunaan IUD dan pil KB justru mengalami peningkatan, IUD meningkat dari 6,18 persen pada tahun 2019 menjadi 6,76 persen pada tahun 2020, dan pil KB meningkat dari 25,70 persen pada tahun 2018 menjadi 33,52 persen tahun 2020.

Pada tahun 2020 jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah kondom/karet KB, susuk KB, dan pantang berkala, masing-masing persentasenya kurang dari 4 persen.

**Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kabupaten Siak, 2019-2020**

Alat/Cara Kontrasepsi	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
MOW/ tubektomi/MOP/ vasektomi	3,96	7,16
AKDR/IUD/ spiral	6,18	6,76
Suntikan KB	50,14	41,24
Susuk KB/ norplan/ implanon/ alwalit	6,18	3,84
Pil KB	25,70	33,52
Kondom/ karet KB	3,88	1,20
Pantang Berkala	2,56	3,21
Lainnya	1,39	3,07

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

2

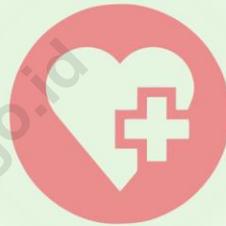
# KESEHATAN

2020



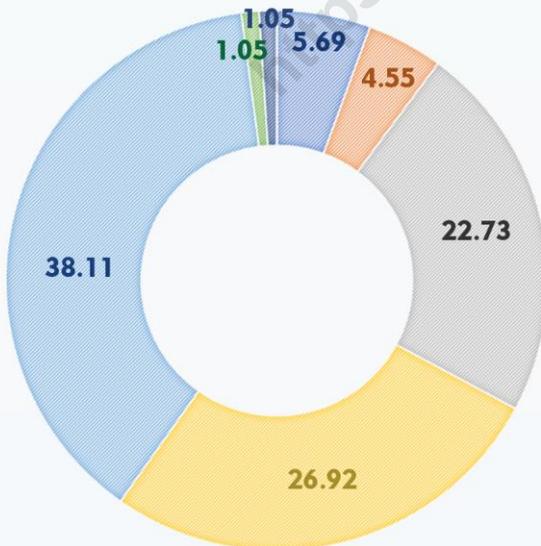
**23.24** persen

**ANGKA KESAKITAN**



**71.03** tahun

**ANGKA HARAPAN HIDUP**



- RS Pemerintah
- RS Swasta
- Praktek Dokter/Bidan
- Klinik/Praktek Dokter Bersama
- Puskesmas/Pustu
- UKBM
- Praktek Pengobatan Tradisional/Alternatif

**52.01%**

penduduk Kabupaten Siak yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan

**PERSENTASE PENDUDUK YANG BEROBAT JALAN MENURUT TEMPAT BEROBAT**



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SIAK





## 2. KESEHATAN

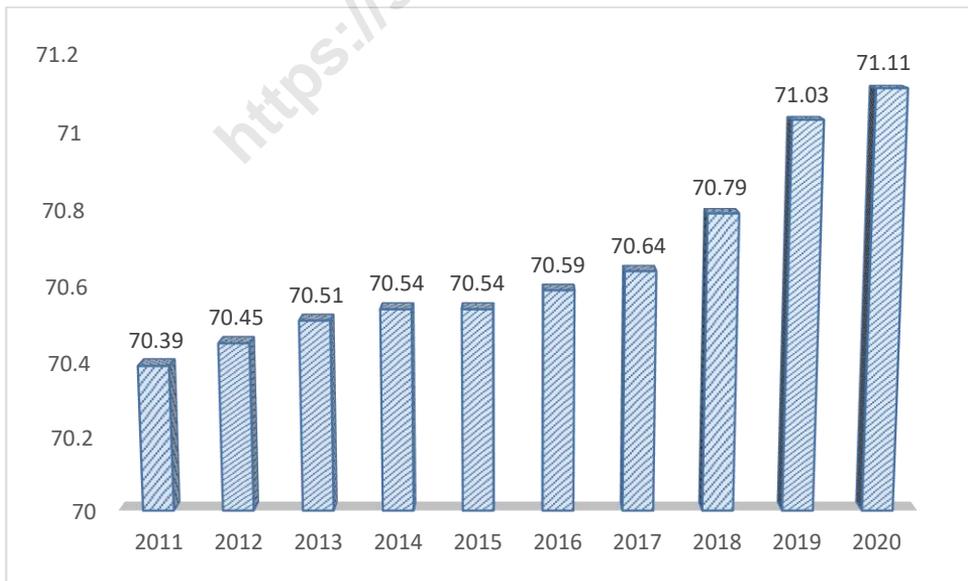
Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

## Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Generasi yang sehat secara fisik dan mental merupakan aset bagi pembangunan bangsa. Dari mereka nantinya akan lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas di masa depan. Memastikan kesehatan yang lebih baik merupakan fokus utama dalam pembangunan di setiap negara. Kesehatan anak-anak, khususnya bayi perlu diperhatikan karena mereka sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit menular dan kekurangan gizi yang dapat mengakibatkan kematian. Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Siak telah diiringi dengan peningkatan Angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada tahun 2011 tercatat 70,39 tahun kemudian tahun 2020 menjadi 71,11 tahun.

**Gambar 2.1** Angka Harapan Hidup di Kabupaten Siak, 2011-2020



Sumber: BPS Provinsi Riau

*Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan.*

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

**Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2019-2020**

Kelompok Umur	Tahun					
	2019			2020		
	Jenis Kelamin					
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan	26,56	26,52	26,54	22,55	23,98	23,24
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan	52,44	55,24	53,81	53,35	52,12	52,73

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

Hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Siak mencapai 23,24 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 26,54 persen. Sedangkan menurut jenis kelamin, terlihat persentase keluhan kesehatan relatif tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki (23,98 persen berbanding 22,55).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan keluhan kesehatan atau penyakit yang diderita adalah dengan berobat. Berobat dapat dilakukan dalam bentuk berobat jalan ataupun rawat inap. Berobat dapat dilakukan baik ke fasilitas kesehatan, maupun ke bukan fasilitas kesehatan. Mengobati keluhan kesehatan sesegera mungkin merupakan hal yang penting. Dengan berobat, keluhan tersebut dapat segera ditangani sehingga tidak mengganggu produktivitas kerja. Selain itu, dengan berobat risiko penyebaran atau komplikasi penyakit yang dialami juga dapat diperkecil.

Data Susenas 2020 menunjukkan lebih dari setengah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir memilih mengobati keluhannya dengan berobat jalan. Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan pada tahun 2020 sebesar 52,73 persen, persentase ini turun jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 53,81 persen. Persentase penduduk yang berobat jalan, baik laki-laki maupun perempuan, sudah cukup baik. Meskipun demikian, persentase penduduk laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan berobat jalan masih lebih tinggi dibandingkan perempuan yakni 53,35 persen berbanding 52,12 persen. Hal ini mengandung arti kesadaran penduduk laki-laki terhadap kesehatannya masih lebih baik dibandingkan perempuan.

### **Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan**

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa. Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase perempuan yang penolong proses kelahiran terakhirnya dengan tenaga kesehatan mencapai 97,36 persen di tahun 2020.

**Tabel 2.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kabupaten Siak, 2018-2020**

Tempat Berobat	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tenaga Kesehatan</b>	<b>97,17</b>	<b>100</b>	<b>97,36</b>
Dokter Kandungan	30,72	34,3	31,58
Dokter Umum	3,46	1,9	5,26
Bidan	62,99	63,8	60,53
Perawat/ Tenaga Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Bukan Tenaga Kesehatan</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64</b>
Dukun Beranak, paraji	2,83	0,00	1,32
Lainnya	0,00	0,00	1,32

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2018-2020

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, serta jenis pelayanan kesehatan, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri.

**Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Siak, 2018-2020**

Tempat Berobat	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
RS Pemerintah	4,85	5,33	5,59
RS Swasta	4,96	7,73	4,55
Praktek Dokter/Bidan	35,81	29,66	22,73
Klinik/Praktek Dokter Bersama	26,8	34,8	26,92
Puskesmas/Pustu	27,65	18,21	38,11
UKBM*	2,64	8,28	1,05
Praktek Pengobatan Tradisional/Alternatif	2,73	0,27	1,05
Lainnya	0,93	0,33	0,00
<b>% Penduduk yang Berobat Jalan</b>	<b>47,18</b>	<b>53,81</b>	<b>52,01</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2018-2020

Keterangan:

UKBM\* terdiri dari Poseksdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

Tabel 2.3 memperlihatkan tingginya persentase penduduk yang memanfaatkan fasilitas Puskesmas. Kondisi ini mungkin dikarenakan kemudahan dalam akses karena dekat rumah, atau biaya yang lebih terjangkau. Namun terjadi penurunan penduduk yang berobat ke praktek dokter/bidan, klinik/praktik dokter bersama, RS Pemerintah dan RS Swasta menjadi 22,73 persen, 26,92 persen, 5,59 persen dan 4,55 persen pada tahun 2020. Sebaliknya terjadi peningkatan tajam penduduk yang berobat ke puskesmas/pustu dari 18,21 persen pada tahun 2019 menjadi 38,11 persen pada tahun 2020. Perubahan pola tersebut diperkirakan karena mudahnya akses serta peningkatan performa puskesmas/pustu yang didukung pemda sebagai respon pandemi.

**Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Siak, 2020**

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Biaya Berobat	1,26	0	0,63
Tidak Ada Biaya Transport	0	0	0
Tidak Ada Sarana Transport	0	0,63	0,31
Waktu Tunggu Pelayanan Lama	0	0	0
Mengobati sendiri	66,04	68,55	67,30
Tidak Ada yang Mendampingi	0	0	0
Merasa Tidak Perlu	32,08	29,56	30,28
Lainnya	0,63	1,26	0,94

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2020

Di antara penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, masih ada sebesar 52,01 persen yang tidak berobat jalan di tahun 2020. Alasan tidak berobat jalan bermacam-macam dengan alasan tertinggi penduduk Siak tidak berobat jalan adalah karena mengobati sendiri keluhan kesehatannya sebanyak 67,30 persen dan merasa tidak perlu mengobati keluhan kesehatannya sebanyak 30,28 persen.

Secara menyeluruh kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih mengalami peningkatan yang sangat nyata dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/ tidak terlatih/ tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah bahkan negara.

## Pemanfaatan Jaminan Kesehatan

Kepemilikan jaminan kesehatan berhubungan dengan kesiapan seseorang dalam menghadapi risiko kesehatan yang akan ditanggung di masa datang. Dengan memiliki jaminan kesehatan, seseorang akan memperoleh bantuan pembiayaan kesehatan ketika melakukan perawatan di fasilitas kesehatan. Tidak salah kiranya jika dikatakan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan dapat menjamin kesehatan seseorang. Kepemilikan jaminan kesehatan juga perlu diimbangi dengan pemanfaatannya.

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa sebanyak 52,88 persen penduduk tidak memanfaatkan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Sementara jenis jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat siak adalah BPJS Kesehatan baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Non-PBI.

**Tabel 2.5 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Jenis kelamin di Kabupaten Siak , 2020**

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
BPJS Kesehatan BPI	9,35	10,07	9,71
BPJS Kesehatan non BPI	35,25	35,97	35,61
Jamkesda	0	2,16	1,08
Asuransi Swasta	0	0	0
Jaminan Kesehatan Perusahaan/Kantor	1,44	0	0,72
Tidak Menggunakan Jaminan Kesehatan	53,96	51,80	52,88

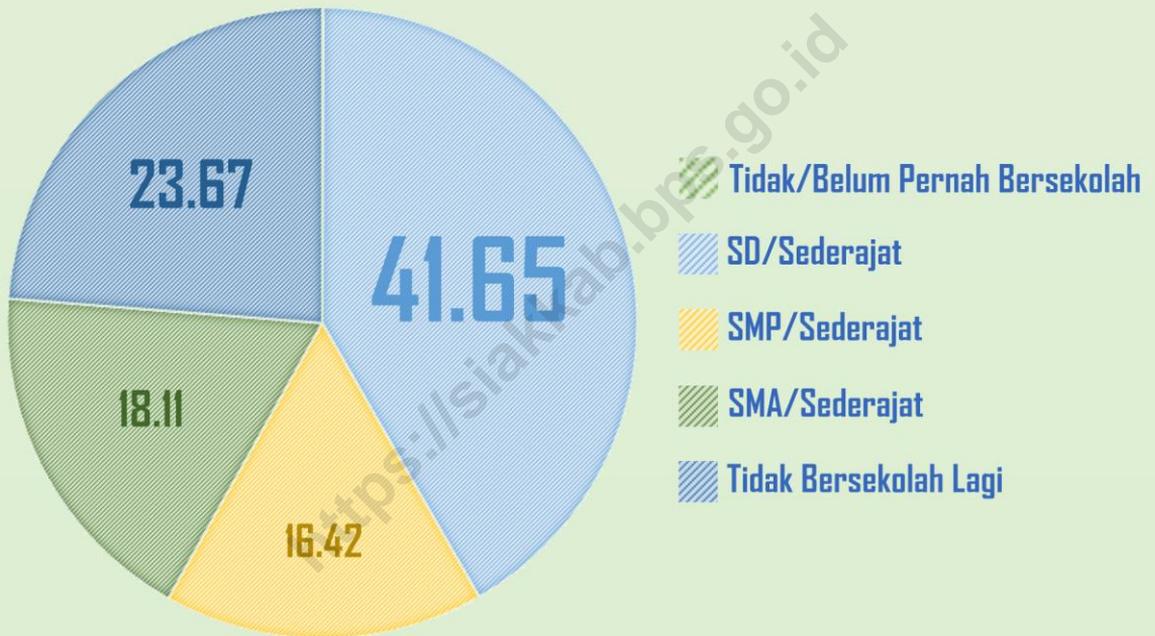
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2020

3

## PENDIDIKAN

2020

PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 7-24 TAHUN MENURUT STATUS PENDIDIKAN



## ANGKA PARTISIPASI MURNI

99.49



SD

82.75



SMP

71.93



SMA

**Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SIAK





---

## 3. PENDIDIKAN

---



endidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usahapemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS

### **Angka Melek Huruf (AMH)**

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung dengan angka arab dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketrampilannya. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumberdaya yang ada di lingkungannya. Bagi pendidikan persekolahan, diharapkan akan mampu menekan angka putus sekolah di pendidikan persekolahan.

Pada tahun 2020, terjadi kenaikan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Siak bila dibandingkan dengan tahun 2019. AMH naik dari 98,80 persen menjadi 99,64 persen. Peningkatan AMH ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka buta aksara masyarakat dan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan, walaupun minimal hanya dapat membaca dan menulis. Hal ini juga dapat mencerminkan keberhasilan program pemberantasan buta aksara yang telah dilakukan oleh pemerintah.

**Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Siak, 2019-2020**

Angka Melek Huruf	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	99,35	99,99
Perempuan	98,22	99,26
Laki-laki + Perempuan	98,80	99,64

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

AMH penduduk laki-laki pada tahun 2020 sebesar 99,99 persen dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 99,35 persen. Sementara itu, pada AMH penduduk perempuan pada tahun 2020 sebesar 99,26 persen, juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 98,22 persen.

Program pemberantasan buta aksara harus terus dilakukan sehingga angka buta aksara masyarakat dapat terus ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya. Pemerintah harus terus menumbuhkan semangat untuk memacu percepatan penurunan angka buta aksara dengan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta. Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini, memungkinkan angka buta aksara akan terus mengalami penurunan.

### **Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam halmengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Indikator rata- rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan. Salah satu cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia khususnya di Kabupaten Siak yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah.

Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

**Gambar 3.1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Siak, 2019-2020**



Sumber: Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Provinsi Riau, 2020

Secara umum, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Siak pada tahun 2020 sebesar 9,66 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Siak baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 3 SMP atau putus sekolah dikelas 1 SMA. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah untuk laki-laki mencapai 9,84 tahun. Artinya laki-laki di Siak mampu menempuh pendidikan hingga lulus SMP, atau putus sekolah di kelas 1 SMA

## Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Pada tahun 2020, penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP ke atas mencapai 55,61 persen, menurun dari tahun 2019 sebesar 71,73 persen. Secara umum persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah pendidikan mencapai 14,60 persen. Pemulihan aktivitas pendidikan dinilai dapat meningkatkan partisipasi sekolah khususnya di Kabupaten Siak.

**Tabel 3.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Siak, 2019-2020**

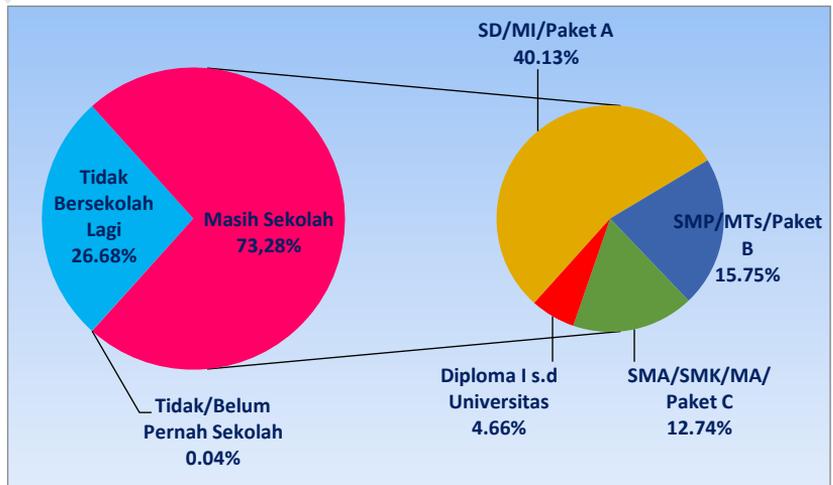
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Tahun	
	2019	2020
Tidak memiliki	7,58	14,60
SD/MI/ Paket A	20,7	22,20
SMP/MTs/ Paket B	25,23	19,50
SMA/MA/ Paket C	30,10	23,90
SM Kejuruan	9,01	5,60
Diploma I dan II	0,25	0,40
Akademi / Diploma III	1,01	1,01
DIV/ S1/ S2/ S3	6,13	5,20
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

Penduduk berumur 7-24 tahun merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa yang seharusnya sedang berada dalam dunia pendidikan. Namun kondisi perekonomian terutama biaya pendidikan terkadang menghambat kemauan seseorang untuk bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, tidak sedikit pula hambatan yang muncul sebenarnya bukan karena alasan biaya pendidikan, seperti motivasi, lingkungan, pergaulan, juga penyalahgunaan teknologi informasi.

Untuk wilayah Kabupaten Siak pada tahun 2020, persentase penduduk umur 7-24 tahun yang masih bersekolah menunjukkan kondisi yang relatif baik dengan capaian 73,28 persen (dengan sebanyak 40,13 persen telah menamatkan pendidikan dasar). Akan tetapi, 26,68 persen sisanya sangat disayangkan berada dalam kondisi tidak bersekolah lagi. Kondisi ini tentu wajib menjadi perhatian khusus bersama, baik pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan di Kabupaten Siak.

**Gambar 3.2 Persentase Penduduk 7 -24 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Siak, 2020**



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2020

## Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Nilai APS yang tidak mencapai 100 menunjukkan masih adanya penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih belum bersekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2020 masih terdapat sekitar 0,02 persen penduduk usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Sedangkan pada kelompok usia 13-15 tahun masih cukup besar bila dibandingkan dengan kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 6,93 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan. Tabel di bawah juga menunjukkan bahwa APS penduduk laki-laki maupun perempuan pada kelompok umur 7-12 tidak menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok, sedangkan pada kelompok umur 16-18 APS perempuan lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. Perbedaan APS penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya kesenjangan yang kecil. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa semakin meratanya pendidikan bagi penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

**Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Siak, 2019- 2020**

Kelompok Umur	Tahun					
	2019			2020		
	Jenis Kelamin					
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	99,18	99,33	99,25	100,00	99,97	99,98
13-15	95,12	90,13	92,54	93,42	92,70	93,07
16-18	82,01	88,08	84,93	79,05	90,50	85,15

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Pada tahun 2020 secara umum terjadi peningkatan APM pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak-anak mereka dengan tepat waktu sudah mulai berjalan dengan baik.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, tahun 2020 APM SD untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan APM SD untuk perempuan, APM SD untuk laki-laki tercatat sebesar 99,83 persen, berbanding 99,29 persen APM Perempuan. Begitu pula pada jenjang pendidikan SMP, APM perempuan juga menunjukkan kondisi yang lebih rendah dari pada laki-laki, APM perempuan tercatat sebesar 81,04 persen berbanding 83,39 persen APM laki-laki. Untuk APM SMA, APM perempuan justru lebih besar bila dibandingkan dengan APM laki-laki. APM SMA perempuan tercatat sebesar 77,56 persen, sementara APM SMA laki-laki sebesar 65,42 persen pada tahun 2019.

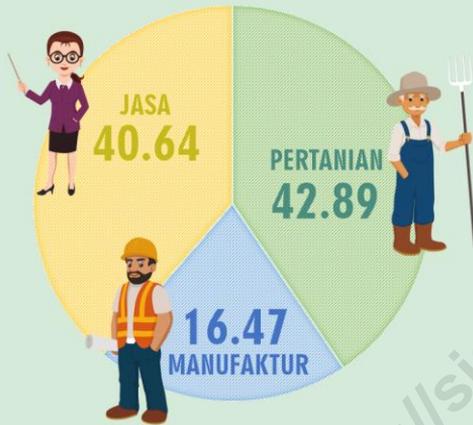
**Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Siak, 2019-2020**

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2018			2019		
	Jenis Kelamin					
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	99,18	99,33	99,25	99,83	99,29	99,56
SMP	87,13	76,39	81,58	83,39	81,04	82,24
SMA	69,35	73,25	71,23	65,42	77,56	71,88

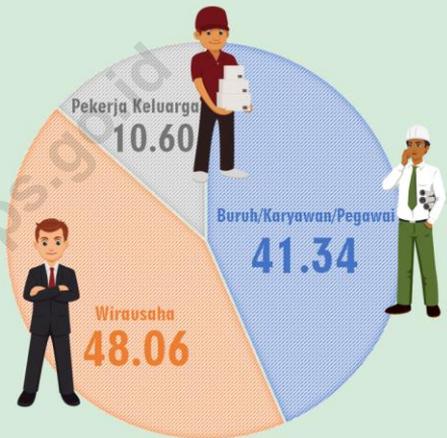
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

# KETENAGAKERJAAN

Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kategori Lapangan Usaha 2021



Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan 2021



TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA



## TPAK

Pada tahun 2020, 62-63 dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Siak merupakan angkatan kerja

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



## TPT

Pada tahun 2020, 5-6 dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Siak merupakan pengangguran.





---

## 4. KETENAGAKERJAAN

---

**S**alah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, persentase pekerja anak, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.

### **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Kabupaten Siak pada Agustus 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,96 persen dibandingkan tahun 2020. Bertambahnya jumlah angkatan kerja pada periode yang sama juga diiringi dengan kenaikan persentase TPAK. Persentase TPAK mengalami kenaikan dari 62,78 persen di tahun 2020 menjadi 64,69 persen di tahun 2021, yang artinya bertambahnya jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.

**Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Siak, 2019-2021**

Indikator	2019	2020	2021
TPT	4,13	5,80	4,34
TPAK	64,77	62,78	64,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu sebesar 1,46 persen dari 5,80 persen di tahun 2020 menjadi 4,34 persen di tahun 2021.

### Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan Utama

Lapangan usaha pertanian merupakan lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Hal ini terkait dengan luasnya areal pertanian yang dimiliki kabupaten Siak. Pada tahun 2021, sebanyak 42,89 persen penduduk yang bekerja berusaha di usaha pertanian, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 40,57 persen.

Sementara itu, penduduk yang bekerja di lapangan usaha manufaktur mengalami penurunan dari 20,72 persen di tahun 2020 menjadi 16,47 persen di tahun 2021.

Terjadi pergeseran komposisi tenaga kerja yang beralih ke lapangan usaha jasa, dari 38,71 persen di tahun 2020 menjadi 40,64 persen di tahun 2021. Hal ini dapat diartikan bahwa lapangan usaha ini mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas atau tingkat kesempatan kerja yang relatif lebih besar.

**Tabel 4.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Siak, 2019- 2021**

Kelompok Usaha	Tahun		
	2019	2020	2021
Pertanian	43,82	40,57	42,89
Manufaktur	16,19	20,72	16,47
Jasa	39,99	38,71	40,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pola proporsi status pekerjaan utama penduduk yang bekerja di Kabupaten Siak pada periode 2019-2020 didominasi oleh penduduk bekerja dengan upah/gaji. Sedangkan, pada tahun 2021 terjadi pergeseran struktur status penduduk bekerja dengan berusaha/wiraswasta. Pada tahun 2019, total penduduk Kabupaten Siak yang bekerja dengan upah/gaji sebesar 45,17 persen dan tahun 202 sebesar 43,48 persen. Sementara itu, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 41,34 persen. Dari pola tersebut menggambarkan bahwa terjadi peningkatan minat penduduk untuk menjadi pengusaha. Walaupun demikian, masih diperlukan pengembangan usaha ekonomi kreatif, dimana dapat menambah lapangan pekerjaan sehingga tidak bergantung pada upah/gaji yang sewaktu-waktu bisa dihentikan jika terjadi kebangkrutan pada perusahaan.

**Tabel 4.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Siak, 2019-2021**

Status Pekerjaan Utama	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(3)
<b>Penduduk Bekerja dengan Upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)</b>	<b>45,17</b>	<b>43,48</b>	<b>41,34</b>
<b>Berusaha/Wiraswasta</b>	<b>45,27</b>	<b>43,15</b>	<b>48,06</b>
• Pengusaha	15,58	13,23	14,26
• Berusaha dibantu buruh tetap dan tidak tetap	17,72	16,50	16,81
• Pekerja bebas	11,97	13,42	16,99
<b>Pekerja Keluarga</b>	<b>9,55</b>	<b>13,37</b>	<b>10,60</b>
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.



5

## POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA

### RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PENDUDUK KABUPATEN SIAK 2021



Rp 1.390.843,-

49,00%



Rp 692.688,-  
Non-Makanan

51,00%



Rp 698.155,-  
Makanan

### PENGELUARAN MAKANAN BERDASARKAN KOMODITAS TERTINGGI 2021



Rp 174.372,-

Makanan dan  
Minuman Jadi



Rp 113.212,-

Rokok



Rp 72.773,-

Padi-padian



Rp 70.285,-

Ikan



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SIAK





---

## 5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

---

**P**ola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

### **Pengeluaran Rumah Tangga**

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

**Tabel 5.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Siak, 2020 - 2021**

Jenis Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan			
	Nominal (Rp)		Persentase (%)	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	747.477	698.155	53,00	50,20
Bukan Makanan	662.905	692.688	47,00	49,80
Siak	1.410.382	1.390.843	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Siak, 2020-2021

Tabel 5.1 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2020 dan 2021. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2020-2021 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk menurun dari Rp 1.410.382,- menjadi Rp 1.390.843,-. Bila dilihat persentasenya pengeluaran untuk bukan makanan mengalami kenaikan dari 47,00 persen pada tahun 2020 menjadi 49,80 persen pada tahun 2021. Sebaliknya, pengeluaran untuk makanan menurun dari 53,00 persen menjadi 50,20 persen. Pengeluaran untuk non makanan mendominasi pengeluaran penduduk, artinya orientasi pengeluaran sudah sedikit beralih ke pengeluaran non makanan yang terdiri dari perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama lainnya dan lain-lain.

**Tabel 5.2. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita/bulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Siak, 2020-2021**

Kelompok Komoditas	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan			
	Nominal (Rp)		Rasio	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Makanan</b>				
Padi-padian	75.416	72.773	0,05	0,05
Umbi-umbian	7.185	6.800	0,01	0,01
Ikan	142.496	70.285	0,10	0,05
Daging	46.413	38.078	0,03	0,03
Telur dan susu	38.561	46.057	0,03	0,03
Sayur-sayuran	64.844	66.982	0,05	0,05
Kacang-kacangan	11.100	11.660	0,01	0,01
Buah-buahan	38.694	29.615	0,03	0,02
Minyak dan Kelapa	19.105	23.296	0,01	0,02
Bahan Minuman	18.672	21.483	0,01	0,02
Bumbu-bumbuan	12.047	12.836	0,01	0,01
Konsumsi lainnya	9.992	10.705	0,01	0,01
Makanan dan minuman jadi	167.797	174.372	0,12	0,13
Rokok	95.155	113.212	0,07	0,08
<b>Jumlah Makanan</b>	<b>747.477</b>	<b>698.155</b>	<b>0,53</b>	<b>0,51</b>
<b>Bukan makanan</b>				
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	353.356	365.451	0,25	0,26
Aneka komoditas dan jasa	144.207	152.444	0,10	0,11
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	50.026	47.378	0,04	0,03
Komoditas tahan lama	64.207	72.318	0,05	0,05
Pajak, pungutan dan asuransi	42.998	50.017	0,03	0,04
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	8.110	5.081	0,01	0,00
<b>Jumlah Bukan Makanan</b>	<b>662.905</b>	<b>692.688</b>	<b>0,47</b>	<b>0,49</b>
<b>Total</b>	<b>1.410.382</b>	<b>1.390.843</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

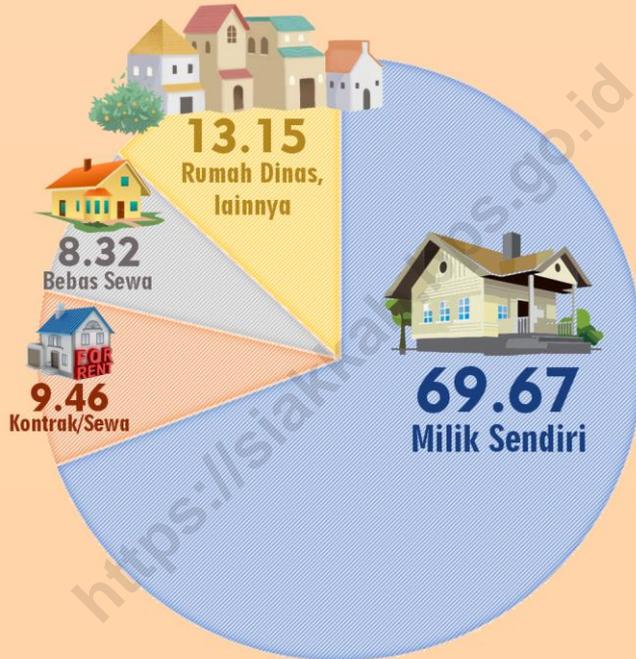
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Siak, 2020-2021

Jika dilihat menurut kelompok komoditas tahun 2021, rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan didominasi untuk konsumsi makanan dan minuman jadi dan diikuti oleh konsumsi rokok. Sementara itu, rata-rata pengeluaran tertinggi untuk konsumsi non makanan pada tahun 2021 didominasi oleh konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

## PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

### PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT JENIS TEMPAT TINGGAL 2020



Sumber Air Minum Bersih



Sumber Air Minum Layak



Penerangan Listrik





---

## 6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

---

**R**umah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu

*UU No. 1 Tahun 2011 menyebutkan salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.*

Untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

### **Kualitas Rumah Tinggal**

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2020, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah menunjukkan adanya penurunan, walaupun penurunan tersebut tidak terlalu besar yaitu sebesar 98,60 persen atau menurun bila dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 99,88 persen.

*Pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.*

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, walaupun sebagian besar rumah tangga sudah menghuni rumah dengan berlantaikan bukan tanah, namun masih terdapat rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah berlantaikan tanah yaitu sebesar 1,40 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Pada tahun 2020, kualitas rumah yang beratap layak mencapai 99,50 persen, atau mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 99,06 persen. Selanjutnya pada tahun yang sama, kualitas rumah dengan dinding terluas dari tembok dan kayu mencapai 98,60 persen, atau mengalami penurunan dari tahun 2019 yang sebesar 99,67 persen.

**Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Siak, 2019-2020**

Indikator Kualitas Perumahan (1)	Tahun	
	2019 (2)	2020 (3)
Lantai bukan tanah (%)	99,88	98,60
Atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes (%)	99,06	99,50
Dinding tembok dan kayu (%)	99,67	98,60

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup>.

Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya.

Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m<sup>2</sup> dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m<sup>2</sup> (BPS, 2001). Pada tahun 2020 luas tempat tinggal cenderung didominasi pada kelompok luas 50-99 m<sup>2</sup> sebesar 42,27 persen, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 42,60 persen.

Namun demikian, terdapat penurunan pada persentase rumah tangga yang menempati luas tempat tinggal pada kelompok luas dibawah 20 m<sup>2</sup> dari 0,37 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 1,53 persen pada tahun 2020 dan pada kelompok luas tempat tinggal 20-49 m<sup>2</sup>, meningkat dari 34,71 persen pada tahun 2019 menjadi 41,19 persen pada tahun 2020.

### **Fasilitas Rumah Tinggal**

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2020, rumah tangga di Siak yang menggunakan sumber air minum bersih (terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat  $\geq 10$  m) mencapai 83,11 persen. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum layak (terdiri dari leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat  $\geq 10$  m) pada tahun 2020 mencapai 20,55 persen.

**Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Siak, 2019-2020**

Fasilitas Perumahan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Sumber Air minum Bersih <sup>1)</sup>	85,95	83,11
Sumber Air minum Layak <sup>2)</sup>	22,44	20,55
Jamban sendiri	97,90	97,09
Tempat Pembuangan Akhir Tinja berupa Tanki/SPAL	93,34	91,27
Sumber penerangan Listrik	99,19	99,50

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti thypus, disentri, kolera, dan sebagainya.

Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama tahun 2019-2020 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri menurun dari 97,90 persen menjadi 97,09 persen. Kebutuhan akan jamban sendiri sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Disamping itu, tempat pembuangan akhir tinja juga mempengaruhi faktor kesehatan masyarakat. Adanya Tanki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2020 rumah tangga yang menggunakan tangki septik sudah mencapai 91,27 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 93,34 persen.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, sebesar 99,50 persen rumah tangga telah menikmati fasilitas penerangan listrik, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 99,19 persen.

## Status Kepemilikan Rumah Tinggal

*Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.*

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

**Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Siak, 2019-2020**

Status Kepemilikan Rumah Tinggal (1)	Tahun	
	2019 (2)	2020 (3)
Milik Sendiri	74,73	69,67
Kontrak/sewa	12,98	9,46
Bebas Sewa	8,03	8,32
Rumah Dinas, lainnya	4,26	13,15

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

Berdasarkan hasil Susenas 2020, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 69,67 persen, sisanya 30,33 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 9,46 persen kontrak/ sewa, 8,32 persen bebas sewa, 13,15 persen rumah dinas dan lainnya.



## Daftar Pustaka

- 2010      **Proyeksi Penduduk Provinsi Riau 2010-2025**  
Jakarta: Badan Pusat Statistik
- 2017      **Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2017**  
(Berdasarkan Data Susenas 2017)  
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
- 2018      **Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2018**  
(Berdasarkan Data Susenas 2018)  
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
- 2019      **Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2019**  
(Berdasarkan Data Susenas 2019)  
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
- 2019      **Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Siak 2020**  
(Berdasarkan Data Susenas 2020)  
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak
- 2020      **Kabupaten Siak Dalam Angka 2020**  
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
- 2020      **Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2020**  
(Berdasarkan Data Susenas 2020)  
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau



## Istilah Teknis

### **Air Minum Bersih**

Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) > 10 meter.

### **Angka Beban Tanggungan**

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

### **Angka Harapan Hidup pada waktu Lahir**

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

### **Angka Kematian Bayi**

Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

### **Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)**

Banyaknya kelahiran per seribu wanita dari golongan umur 15-49 tahun yang terjadi pada waktu tertentu.

### **Angka Kelahiran Total**

Banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita.

### **Angka Kelahiran Kasar**

Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran untuk setiap seribu penduduk yang terjadi di suatu daerah pada waktu tertentu.

### **Angka Kesakitan**

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

### **Angka Melek Huruf**

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

### **Angka Partisipasi Sekolah**

Rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.

### **Angka Putus Sekolah**

Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

### **Angka Partisipasi Murni**

Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

### **Angkatan Kerja**

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

### **Bekerja**

Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai bekerja.

### **Indeks Gini**

Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

**Jumlah Jam Kerja Seluruhnya**

Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).

**Lapangan Usaha**

Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan in mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indoonesia (KBLI) dalam satu digit.

**Masih Bersekolah**

Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi

**Penduduk Usia Kerja**

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

**Penganggur**

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

**Pengangguran Terbuka**

Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah :

- a. yang mencari pekerjaan
- b. yang mempersiapkan usaha
- c. yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- d. yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

**Pengeluaran**

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

**Pekerja Tidak Dibayar**

seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji

**Perkotaan**

Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah administratif terkecil. Wilayah ini dikatakan sebagai perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, lapangan kegiatan ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan

raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya).

Secara operasional penentuan daerah perkotaan dibuat dengan sistim skoring tertentu. Prosedur penentuan daerah perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku hingga saat ini.

**Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)**

Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.

**Rasio Jenis Kelamin**

Perbandingan atara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di satu daerah pada waktu tertentu.

**Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

**Status Pekerjaan**

Kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

**Tamat Sekolah**

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

**Tingkat Pertumbuhan Penduduk**

Angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



*Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Siak*

Komplek Perkantoran Sei Betung, Siak Sri Indrapura

Telp : (0764) 800 1052 - email : [bps1405@bps.go.id](mailto:bps1405@bps.go.id)

Homepage : <https://siakkab.bps.go.id>